

PERAN PENTING ASPEK KEBIJAKAN PERTAHANAN DALAM MENCAPAI SISTEM KEAMANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**Muhamad Tarom., SP, MSI. Universitas Sebelas April
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hery Yuniarto, SE.M.Si (Han)
Analisis Pertahanan Negara Madya Setditjen Pothan**

Kebijakan Pertahanan dalam Mewujudkan Keamanan Nasional

Keamanan nasional merupakan elemen fundamental dalam menjaga stabilitas suatu negara. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pertahanan memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Pendekatan yang digunakan dalam keamanan nasional mencakup dua aspek utama, yaitu keamanan konvensional dan non-konvensional. Selain itu, tantangan pertahanan semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi, geopolitik global, serta ancaman asimetris yang tidak lagi berbentuk perang konvensional semata (Mardhani, 2020).

Keamanan dan Pertahanan dalam Perspektif Nasional

Keamanan nasional tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain seperti ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, ideologi, serta demografi dan sumber daya alam (A'raf, 2015). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis yang strategis memiliki berbagai tantangan dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya. Ancaman seperti konflik perbatasan, separatisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan transnasional menjadi isu utama dalam kebijakan pertahanan nasional.

Selain itu, ancaman di era modern juga mencakup serangan siber, propaganda digital, serta perang informasi yang dapat merusak stabilitas negara (Manafe et al., 2023). Teknologi yang semakin maju juga memberikan tantangan baru dalam pengelolaan pertahanan nasional, seperti penggunaan drone, sistem persenjataan otomatis, dan peperangan berbasis kecerdasan buatan (AI). Oleh karena itu, strategi pertahanan

tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tetapi juga harus memperkuat ketahanan siber dan teknologi informasi.

Strategi Kebijakan Pertahanan

Untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan pertahanan berbasis ketahanan nasional yang berlandaskan pada konsep Astagatra (delapan aspek kehidupan nasional) (Nugraha, 2017). Faktor-faktor ini dibagi menjadi tiga aspek alamiah (geografi, demografi, dan sumber daya alam) serta lima aspek sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan).

Dalam implementasinya, kebijakan pertahanan Indonesia menekankan pada peningkatan kapasitas militer, optimalisasi industri pertahanan dalam negeri, serta kerja sama internasional dalam bidang keamanan. Sebagai contoh, pemerintah telah memperkuat sektor pertahanan melalui program Minimum Essential Force (MEF), pengembangan alutsista, serta peningkatan kerja sama strategis dengan negara mitra (Arto et al., 2021).

Pemerintah juga menargetkan peningkatan interoperabilitas antara TNI dan Polri, serta sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam mengatasi ancaman yang bersifat multidimensi. Upaya membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pertahanan negara juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, pendidikan bela negara, pembinaan komponen cadangan, serta penguatan sistem keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) menjadi bagian dari kebijakan pertahanan yang lebih luas (Iskandar, 2019).

Ancaman dan Tantangan Keamanan

Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang bersifat kompleks dan dinamis. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

- **Konflik Perbatasan:** Perselisihan wilayah dengan negara-negara tetangga masih menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan diplomasi dan pertahanan yang seimbang (Djalal, 2013).

- **Separatisme di Papua:** Gerakan separatis yang terus berkembang memerlukan strategi pertahanan yang tidak hanya mengandalkan pendekatan militer, tetapi juga pembangunan sosial dan ekonomi (Fakhrul et al., 2022).
- **Kejahatan Siber:** Serangan siber yang meningkat dapat mengancam keamanan informasi negara dan memerlukan sistem pertahanan siber yang kuat (Manafe et al., 2023).
- **Ketegangan di Laut Cina Selatan:** Konflik geopolitik di kawasan ini berpotensi berdampak pada stabilitas Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan luar negeri dan pertahanan yang adaptif (Indrawan, 2015).
- **Terorisme dan Radikalisme:** Perkembangan ideologi ekstrem yang mengancam persatuan nasional menuntut adanya kebijakan pencegahan yang efektif (Pawening & Triadi, 2023).

Selain itu, perubahan iklim dan bencana alam juga menjadi tantangan keamanan yang perlu diantisipasi. Pemanasan global yang meningkatkan frekuensi bencana alam dapat menyebabkan konflik sumber daya serta migrasi paksa yang berdampak pada stabilitas nasional. Oleh karena itu, pertahanan negara juga harus mencakup mitigasi bencana dan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim.

Pembelajaran dari Negara Lain

Beberapa negara telah mengembangkan strategi keamanan nasional yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Misalnya:

- **Jepang** menerapkan kebijakan pertahanan dengan mengandalkan aliansi strategis dengan Amerika Serikat sambil tetap mempertahankan kemampuan militernya secara mandiri (Mardhani, 2020).
- **Uni Eropa** mengutamakan kerja sama regional dalam menghadapi ancaman keamanan, termasuk kejahatan transnasional dan terorisme (Indrawan, 2015).
- **Turki** memiliki Dewan Keamanan Nasional yang berfungsi sebagai koordinator utama kebijakan pertahanan dan keamanan, yang dapat menjadi model bagi Indonesia dalam memperkuat koordinasi antar lembaga keamanan (Iskandar, 2019).

Selain itu, negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan China telah membangun sistem keamanan berbasis teknologi tinggi yang dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam mengembangkan pertahanan digital dan kecerdasan buatan untuk kepentingan keamanan nasional.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Keamanan nasional adalah faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan suatu negara. Indonesia harus terus memperkuat sistem pertahanannya dengan pendekatan yang holistik, mencakup aspek militer, diplomasi, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan pertahanan dan keamanan. Selain itu, peningkatan kerja sama internasional dan penguatan industri pertahanan dalam negeri juga menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks (Mardhani, 2020).

Pemerintah juga perlu memperkuat kesadaran bela negara di kalangan masyarakat dengan memperluas program pendidikan pertahanan dan menanamkan semangat nasionalisme sejak dini. Dengan strategi pertahanan yang adaptif dan komprehensif, Indonesia dapat memastikan keamanan nasionalnya tetap terjaga serta mendukung stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya.

Referensi

- A'raf, A. (2015). Dinamika Keamanan Nasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 27-40.
- Arto, R. S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Maritim. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(3).
- Djalal, H. (2013). Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 3(2), 15-40.
- Fakhrol, M., Ras, A. R., & Kardi, K. (2022). Keamanan Nasional Sebagai Sistem Pertahanan. *Journal of Syntax Literate*, 7(7).
- Indrawan, J. (2015). Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 5(2), 93-114.
- Iskandar, J. D. H. (2019). Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam

Ketatanegaraan. *Lex Administratum*, 6(4).

- Manafe, C. F. C., Priyanto, S., & Subandi, I. (2023). Implementasi Konsep Keamanan Nasional. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(4), 2063-2073.